

# STRATEGI PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DI PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

*The Implementation Strategy of Information Technology in  
Government Sintang West Kalimantan Province*

Yohanès <sup>1</sup>, Netty Herawati <sup>2</sup>, Lina Sunyata <sup>3</sup>

*Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi penerapan teknologi informasi di Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai dasar merumuskan strategi yang paling tepat dipilih dalam menerapkan teknologi informasi guna mewujudkan *electronic government*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi faktor internal terdiri atas: 1) sumber daya manusia, 2) sarana dan prasarana, 3) dana/anggaran, dan 4) budaya organisasi, yang masing-masing teridentifikasi sebagai kekuatan (*strength*) ataupun kelemahan (*weakness*). Sedangkan yang menjadi faktor eksternal terdiri : 1) kondisi ekonomi, 2) politik dan hukum, 3) sosial budaya, 4) demografi dan 5) perkembangan teknologi dan globalisasi, yang selanjutnya berpotensi menjadi peluang (*opportunities*) ataupun ancaman (*threats*). Hasil analisa SWOT terhadap lingkungan strategis dengan mempertimbangkan seluruh unsur kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sintang ditetapkan 7 (tujuh) strategi dalam penerapan teknologi informasi yaitu: 1) Pengembangan organisasi dan tata kerja, 2) Pembuatan aturan perundangan dan kebijakan, 3) Pengembangan SDM untuk menerapkan teknologi informasi, 4) Pembangunan infrastruktur dan akses jaringan komunikasi data yang memadai, 5) Pengembangan perangkat-perangkat lunak yang diperlukan, 6) Pemeliharaan dan perawatan perangkat lunak dan keras/jaringan, dan 7) Pengembangan dan koordinasi layanan informasi yang mampu mendukung terwujudnya masyarakat yang kompetitif serta dapat menarik minat investor ke Kabupaten Sintang.

*Kata Kunci: Strategi, Penerapan, Teknologi Informasi.*

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah Kabupaten Sintang sejak tahun 2005 telah menggulirkan program pemanfaatan teknologi informasi dan komputer untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja guna pengembangan sistem perkantoran elektronik pada instansi Perangkat Daerah. Selain itu juga dalam rangka pengembangan *e-government* telah terpasang *Internet System Wireless Local Area Net Work* (WLAN) pada hampir seluruh instansi pemerintah. Selanjutnya, guna mendukung pelayanan publik, pemerintah Kabupaten

<sup>1</sup> PNS Kabupaten Sintang

<sup>2</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

<sup>3</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

Sintang melalui APBD Tahun Anggaran 2009 telah mengembangkan Situs Pemerintah atau *Website* dengan alamat: [www.sintang.go.id](http://www.sintang.go.id). Pada awal tahun 2012, kegiatan pelelangan untuk semua jenis barang dan jasa telah mulai dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang terkoneksi hampir ke semua instansi Pemerintah Kabupaten Sintang. Unit kerja teknis yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengembangan *e-government* tersebut adalah Bagian Sandi, Telekomunikasi dan Pengolahan Data Elektronik (Santel dan PDE) Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang. Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 89 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Bagian Sandi Telekomunikasi dan Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta evaluasi penyelenggaraan urusan Sandi, Telekomunikasi dan pengolahan Data Elektronik Sekretariat Daerah dan perangkat daerah lainnya.

Otonomi Award hasil kerjasama Pontianak Post, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui *Gesellschaft For Technische Zusammenarbeit* (GTZ) Jerman, Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Barat, dan Universitas Tanjungpura Pontianak, Sintang ditetapkan sebagai Juara Umum dari 14 (empat belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan otonomi daerah tahun 2010, namun untuk penerapan Teknologi Informasi di Pemerintah Kabupaten Sintang dalam perwujudan *e-government* dinilai belum maksimal dan masih terdapat banyak hambatan baik dari ketersediaan Sumber Daya Manusia maupun kebutuhan anggaran. Hal tersebut dapat dilihat dengan tidak dimanfaatkannya secara optimal *hardware* serta sarana dan prasarana jaringan komputer yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

Berdasarkan kondisi tersebut dapat diketahui bahwa, fasilitas yang telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Sintang belum dapat difungsikan secara optimal pada beberapa instansi. Ketersediaan infrastruktur komunikasi data, komputer dan jaringan komputer di instansi pemerintah membutuhkan tenaga operator komputer dengan kemampuan yang baik pula. Jika dilihat dari penggunaan fasilitas yang ada maka terdapat beberapa faktor penghambat dalam mewujudkan *e-government* di Pemerintahan Kabupaten Sintang antara lain; Kurangnya personil profesional dibidang Teknologi Informasi dan tidak adanya program *upgrading* untuk menyiapkan tenaga profesional di bidang Teknologi Informasi. Selain itu, permasalahan anggaran juga menjadi hambatan yang sangat mempengaruhi penerapan teknologi informasi dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Strategi penerapan teknologi informasi di Pemerintah Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat.

## 2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut:

- a. Analisis faktor internal yang mengkaji pada level internal Satuan Organisasi Pemerintah Kabupaten Sintang meliputi: Sumber Daya Manusia, Anggaran, Sarana dan Prasarana, dan Budaya Organisasi yang dianggap sebagai kekuatan ataupun kelemahan organisasi. Sedangkan analisis faktor eksternal yang dianggap berkontribusi sebagai peluang ataupun ancaman bagi pengembangan teknologi informasi meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, demografi dan teknologi.
- b. Alternatif strategi penerapan teknologi informasi yang dirumuskan melalui analisa lingkungan internal dan eksternal organisasi Pemerintah Kabupaten Sintang dengan menggunakan metode analisa SWOT.

### 3. Perumusan Masalah

Rumusan masalah berikut ini: Bagaimana strategi penerapan teknologi informasi di Pemerintah Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat?

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Pengertian Teknologi Informasi

Teknologi informasi dapat dipahami sebagai teknologi yang berhubungan dengan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan penyebaran informasi. Teknologi informasi terdiri dari *hardware* dan *software*. *Hardware* dapat berupa komputer, *laptop/notebook* dilengkapi dengan perangkat pendukungnya seperti *printer*, jaringan, infokus, modem, LAN, dan lain-lain. Sementara *software* adalah aplikasi-aplikasi dan sistem yang digunakan. Teknologi Informasi (TI) dilihat dari kata penyusunnya adalah teknologi dan informasi. Kata teknologi bermakna pengembangan dan penerapan berbagai peralatan atau sistem untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, kata teknologi berdekatan artinya dengan istilah tata cara. Menurut Azmi, Yan (2009:2), “informasi adalah data yang diproses kedalam bentuk yang lebih berarti bagi penerima dan berguna dalam pengambilan keputusan, sekarang atau untuk masa yang akan datang”. Untuk lebih jelasnya berikut ini penulis kemukakan beberapa definisi mengenai teknologi informasi.

Menurut McKeown yang dikutip oleh Suyanto (2005:3), “teknologi informasi merujuk pada seluruh bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya”. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Williams dan Sawyer yang dikutip oleh Seesar (2010:6), bahwa “teknologi informasi merupakan sebuah bentuk umum yang menggambarkan setiap teknologi yang membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan dan atau menyampaikan informasi”. Sedangkan menurut Ishak (2008:87), “teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima sehingga pengiriman informasi akan lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya”. Information Technology Association of America (ITAA) yang dikutip oleh Sutarnan (2009:13) menyatakan bahwa, “teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, pengembangan, implementasi, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer”

### 2. Komponen-komponen Teknologi Informasi

Komponen teknologi informasi merupakan sub sistem yang terbentuk sehubungan dengan penggunaan teknologi informasi. Seesar (2010:6) memaparkan bahwa teknologi informasi terdiri dari 3 (tiga) komponen utama yang terdiri dari:

1. Perangkat keras (*hardware*)  
Merupakan perangkat fisik yang membangun sebuah teknologi informasi. Contohnya : *monitor, keyboard, mouse, printer, harddisk, memori, mikroprosesor, CD-ROM*, kabel jaringan, antena telekomunikasi, *CPU*, dan peralatan *I/O*.
2. Perangkat lunak (*software*)  
Merupakan program yang dibuat untuk keperluan khusus yang tersusun atas program yang menentukan apa yang harus dilakukan oleh komputer. Perangkat lunak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :
  - a. Perangkat lunak sistem, merupakan perangkat lunak yang dibuat khusus untuk dapat mengontrol semua perangkat keras, sehingga semua perangkat keras teknologi informasi dapat bekerja dengan kompak sebagai sebuah sistem yang utuh. Misalnya : Sistem Operasi *Window, Linux, Unix, OS/2*, dan *FreeBSD*.



- b. Perangkat lunak bahasa pemrograman, merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat program aplikasi maupun perangkat lunak sistem. Misalnya: *Visual Basic, Delphi, Turbo C, Fortran, Cobol, Turbo Assembler*, dan *Java*.
  - c. Perangkat lunak aplikasi, merupakan program jadi siap pakai yang dibuat untuk keperluan khusus. Misalnya untuk keperluan multimedia : ada perangkat lunak *Jet Audio, Windows Media Player, Winamp, Real Player*. Untuk keperluan aplikasi perkantoran: ada *Microsoft Office* dan *Open Office* yang terdiri atas beberapa program untuk berbagai keperluan seperti pengolahan kata, angka, data dan presentasi.
3. Manusia (*brainware*)  
Merupakan personel-personel yang terlibat langsung dalam pemakaian komputer, seperti *Sistem Analis, Web Master, Web Designer, Animator, Programmer, Operator, User* dan lain-lain. Terdapat berbagai peran yang dapat dilakukan manusia dalam bagian sistem komputer, antara lain : *Analis system, Programmer, Operator* dan *Teknisi*

### 3. Peran dan Fungsi Teknologi Informasi

Teknologi informasi dewasa ini menjadi hal yang sangat penting karena sudah banyak organisasi pemerintah yang menerapkan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan organisasi. Penerapan teknologi informasi pada organisasi pemerintah tentunya memiliki tujuan yang berbeda karena penerapan TI pada suatu organisasi adalah untuk mendukung kepentingan organisasinya. Adapun yang menjadi tujuan dari adanya teknologi informasi menurut Sutarman (2009:17), “untuk memecahkan masalah, membuka kreativitas, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan”. Sedangkan 6 (enam) fungsi teknologi informasi menurut Sutarman (2009:18), yaitu :

- a. Menangkap (*Capture*)
- b. Mengolah (*Processing*)
- c. Menghasilkan (*Generating*)
- d. Menyimpan (*Storage*)
- e. Mencari kembali (*Retrieval*)
- f. Transmisi (*Transmission*)

Jogiyanto (2005:23) mengungkapkan bahwa teknologi informasi mempunyai peran utama di dalam organisasi yaitu untuk meningkatkan: Efisiensi Efektivitas; Komunikasi; dan Kompetitif. Penggunaan teknologi informasi merupakan suatu keinginan individu ataupun kelompok dan berkaitan dengan kemampuan. Penggunaan teknologi informasi berkaitan dengan sistem yang berarti individu harus percaya bahwa dalam menggunakan suatu sistem tertentu akan terlepas dari suatu usaha tertentu melalui proses penggunaan aplikasi sistem. Menurut Igbaria (Thai Fung Jin, 2002:16), “Teknologi informasi lebih bersifat aplikatif yang lebih mengarah pada pengelolaan data dan informasi dalam sebuah perusahaan, dengan pemanfaatan teknologi komputer dan komunikasi data akan lebih meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja.” Saat ini teknologi informasi berkembang dengan sangat cepat. Hampir semua bidang kehidupan dan industri sudah tersentuh oleh teknologi informasi, baik itu *entertainmet*, kesehatan, pendidikan, bank dan bahkan untuk kegiatan pemerintahan atau lebih dikenal dengan istilah *electronic government*.

### 4. Electronic Government

*Electronic Government (E-Government)*, menurut intruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* merupakan proses transformasi dimana pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan

kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat birokrasi organisasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses dan transparansi ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Seluruh lembaga-lembaga negara, masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dapat setiap saat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara optimal melalui *e-government*. Dari sisi masyarakat, transparansi akan lebih bisa dilihat oleh masyarakat karena syarat utama penggunaan teknologi informasi untuk proses kerja dan pelayanan publik adalah untuk prosedur pelayanan yang baku dan standar yang jelas. Apalagi, akan timbul kejelasan atas langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk pelayanan serta biaya yang harus dikeluarkan. Dari sisi pemerintah, penggunaan serta penarikan biaya dari masyarakat dapat diawasi karena keterlibatan pihak lain yang lebih profesional dan kredibel dalam pengelolaan keuangan. Berdasarkan Inpres No.3/2003, pemanfaatan teknologi Informasi pada umumnya ditinjau dari sejumlah aspek sebagai berikut: *Leadership*, Infrastruktur Jaringan informasi, Pengelolaan Informasi, Lingkungan Bisnis, Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.

### **5. Strategi Manajemen**

Banyak ahli yang mendefinisikan “strategi” diantaranya sebagai berikut : Bryson (1988:163) menjelaskan tentang strategi sebagai berikut: "Strategi dapat dipikirkan sebagai suatu pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan, atau alokasi sumberdaya yang menunjukkan jati diri suatu organisasi, hal-hal yang dilakukannya, dan alasan melakukan hal-hal tersebut. Dengan demikian, strategi merupakan perluasan dari misi untuk menjembatani antara organisasi tersebut dengan lingkungannya. Strategi umumnya dibuat untuk menanggapi isu strategis, yaitu merupakan garis besar tanggapan organisasi tersebut terhadap pilihan kebijakan yang fundamental. (Bila pendekatan tujuan umum yang dipakai, maka strategi dirumuskan untuk mencapai tujuan tersebut; dan bila pendekatan visi yang dipakai, maka strategi dikembangkan untuk mencapai visi tersebut)." Menurut Barry dalam Tedjo Tripomo (2005:17) menyatakan bahwa: "Strategi adalah rencana tentang apa yang ingin dicapai atau hendak menjadi apa suatu organisasi di masa depan (arah) dan bagaimana cara mencapai keadaan yang diinginkan tersebut (rute)." Sedangkan menurut Amstrong dalam Chandler (2003:37): "Strategi adalah penetapan tujuan dasar jangka panjang dan sasaran perusahaan, dan penerapan serangkaian tindakan, serta alokasi sumber daya yang penting untuk melaksanakan sasaran ini." Selanjutnya, menurut Nawawi (2000:147): "Strategi adalah proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Sedangkan konsep dasar strategi adalah memberdayakan kekuatan untuk mencapai suatu keadaan yang diinginkan baik yang berkaitan dengan bidang keamanan, bidang kesejahteraan, kemamkmuran rakyat, dan bidang bisnis." Lebih lanjut lagi, Faisal Basri (2005:3) menjelaskan bahwa strategi adalah prioritas atau arah keseluruhan yang luas yang diambil oleh organisasi. Strategi adalah pilihan-pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai misi organisasi. Menurut pendapat Faisal Basri (2005:1) bahwa perencanaan strategis adalah proses sistematis yang disepakati organisasi dan membangun keterlibatan diantara *stakeholder* utama tentang prioritas yang hakiki bagi misinya dan tanggap terhadap lingkungan operasi.

Menurut pendapat Miller (dalam Hendrawan, 2005:12) bahwa pendekatan dalam manajemen strategis dibedakan ke dalam pendekatan *what* dan pendekatan *how* yang biasanya diberi label *content* dan *process*. Dalam pendekatan *content* akan dinyatakan hal-hal seperti: apa tujuan organisasi, apa yang dimaksud dengan strategi yang tepat, apa

yang membuat organisasi menjadi berhasil, apa yang menjadi tugas pokok eksekutif dan pertanyaan lain sejenisnya. Menurut pendapat David (dalam Hendrawan, 2005:24) menyebutkan sekurang-kurangnya lima manfaat manajemen strategi, sebagai berikut:

1. Manajemen strategi melatih setiap orang dan organisasi untuk berfikir secara antipasif dan proaktif.
2. Proses penyusunan strategi mendorong terjadinya komunikasi yang sangat dibutuhkan dalam organisasi.
3. Mendorong lahirnya komitmen manajerial.
4. Proses tersebut melahirkan pemberdayaan staf.
5. Organisasi yang menerapkan manajemen strategi menunjukkan kinerja finansial yang lebih baik.

Manajemen strategi juga memberikan gambaran untuk pengambilan keputusan mengenai bagaimana suatu organisasi dapat digerakan untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi organisasi. Berkenaan dengan pilihan strategik maka akan dikaji penentuan pilihan melalui matriks kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats matrix*), melalui cara ini suatu organisasi dapat memandang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai suatu kesatuan yang integral dalam perumusan strategi.

#### **6. Pengertian Mandat, Visi dan Misi**

Tiga hal yang selalu menjadi perhatian dalam setiap merumuskan suatu strategi secara efektif sebagaimana yang dikemukakan Bryson (dalam Tangkilisan, 2005:31) bahwa untuk menerapkan manajemen strategi secara baik dan berhasil guna, maka harus mempertimbangkan langkah-langkah yang diantaranya adalah dengan memperhatikan mandat, visi dan misi organisasi. Menurut pendapat Bryson (dalam Tangkilisan, 2005:34), mandat merupakan suatu keharusan yang memiliki landasan hukum yang secara formal yuridis harus dilaksanakan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Memperjelas mandat berarti mempertegas pembentukan misi organisasi. Menurut Sudirman (2004:16), misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan negara. Secara organisatoris Hani Handoko (1995:108) menerangkan bahwa misi organisasi menunjukkan fungsi yang hendak dijalankan dalam suatu sistem sosial dan ekonomi tertentu. Misi organisasi juga menjelaskan alasan keberadaan institusi atau organisasi tersebut, mengapa ada dan apa tujuan pendiriannya. Pengertian visi menurut Salusu (1998:130) adalah gambaran kondisi masa depan yang masih abstrak, tetapi merupakan konsepsi yang dapat dibaca oleh setiap orang. Berarti visi merupakan suatu pikiran yang melampaui realitas sekarang, sesuatu atau keadaan yang diciptakan yang belum pernah ada sebelumnya dan akan diwujudkan oleh seluruh anggota organisasi. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antipasif, inovatif, serta produktif. Menurut Sudirman (2004:16), visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah adalah terdiri dari Kepala Daerah selaku Top Eksekutif dan Perangkat Daerah selaku unsur pembantu Kepala Daerah. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten, yaitu Kepala Daerah (Bupati) dan Perangkat Daerah Kabupaten. Kabupaten dimaksud adalah Kabupaten Sintang yang



merupakan salah satu dari 14 (empat belas) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya akan diteliti lebih jauh mengenai mandat pembentukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah berkaitan dengan kerangka pelaksanaan azas Desentralisasi, serta penjabaran Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang.

### **7. Faktor-faktor Lingkungan Strategis**

Tujuan dari kegiatan menganalisis lingkungan strategis adalah untuk mengetahui pengaruh-pengaruh kunci, serta pemilihan strategi apa yang paling sesuai dengan tantangan yang datangnya dari lingkungan. Sebagaimana langkah 4 dan 5 dalam manajemen strategi menurut Bryson (dalam Tangkilisan, 2005:31) adalah identifikasi lingkungan eksternal dan lingkungan internal organisasi. Bryant dan White (1987:38) berpendapat bahwa terdapat dua hal yang menyebabkan pentingnya lingkungan tersebut. *Pertama*, lingkungan dapat menyediakan sumber-sumber daya, dan *kedua*, lingkungan juga menawarkan batas atau kendala. Analisis terhadap lingkungan dilaksanakan dengan terlebih dahulu memilahnya ke dalam lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Pengertian lingkungan menurut Salusu (1998:319) adalah hal-hal yang meliputi kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi perkembangan organisasi. Sedangkan menurut Wahyudi (1996:47-48), lingkungan adalah salah satu faktor penting untuk menunjang keberhasilan organisasi dalam persaingan. Selanjutnya, Wahyudi membagi lingkungan menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

Menurut Rangkuty (1997:19) bahwa lingkungan yang mempengaruhi kinerja institusi ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor tersebut patut menjadi pertimbangan dalam analisis lingkungan strategis, khususnya dalam analisis model SWOT. Analisis lingkungan internal dan eksternal akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang isu-isu strategis organisasi. Dalam kaitannya dengan identifikasi lingkungan dan isu-isu strategis dalam penerapan teknologi informasi di Pemerintah Kabupaten Sintang, maka analisis ini akan diarahkan pada penilaian lingkungan internal dan eksternal di sekitar masalah pengembangan teknologi informasi tersebut.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif pada Bagian Sandi, Telekomunikasi dan Pengolahan Data Elektronik (Santel dan PDE) Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang dan pada beberapa badan/dinas/instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA), Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda, dan Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Sintang. Subjek penelitian ini adalah: Pejabat pada Bagian Santel Dan PDE Setda Kabupaten Sintang. Selain itu, sebagai sumber informasi tambahan dalam penelitian ini, adalah: Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kepala Bagian Bagian Santel Dan PDE, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA), Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda, dan Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Sintang. Pengumpulan data penelitian menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data, yaitu: wawancara, observasi dan dokumentasi dengan menggunakan alat berupa pedoman wawancara, pedoman observasi dan alat dokumentasi berupa foto kamrea dan alat perekam wawancara. Data yang

dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif, dilengkapi dengan analisis data sekunder (kuantitatif). Pendekatan data sekunder dimaksudkan agar supaya analisis data kualitatif menjadi lebih komprehensif. Adapun tahap analisis data meliputi : Pengumpulan, Reduksi, Penyajian dan diakhiri dengan Penarikan Kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN**

### **A. Faktor-Faktor Lingkungan Strategis Yang Mempengaruhi Penerapan Teknologi Informasi Di Pemerintah Kabupaten Sintang**

#### **1. Visi Misi Pemerintah Kabupaten Sintang**

Inpres No 3/2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* mengamanatkan kepada setiap Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan *e-government* secara nasional. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang secara umum penentuan Kebijakan Pembangunan *e-government* akan dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal berikut: Langkah awal yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan *e-government* adalah dengan melaksanakan survey sistem yang ada (infrastruktur komunikasi data, komputer, jaringan komputer dan sistem aplikasi) di daerahnya masing-masing untuk mengetahui apa saja yang sudah dimiliki saat ini. Hasil survey tersebut merupakan bekal yang sangat penting untuk mengidentifikasi masalah dan kendala yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil. Pengaruh kedua datang dari perencanaan pembangunan daerah, renstrada, kebijakan politik, kebutuhan pengguna dan ketersediaan anggaran. Kelima faktor tersebut akan sangat menentukan prioritas kebutuhan spesifik masing-masing Pemerintah Daerah sesuai dengan Visi dan Misi pemerintahannya. Selanjutnya pengaruh ketiga datang dari pengalaman-pengalaman yang sudah dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan *e-government* selama ini. Termasuk didalamnya adalah pengetahuan yang sudah didapatkan oleh Pemerintah Daerah dari pelaksanaan studi banding ke daerah/negara lain yang sudah lebih dulu melaksanakan *e-government*. Pengalaman tersebut hendaknya menjadi arah bagi pemerintah untuk semakin mantap dalam mengambil langkah besar dengan bertransisi ke dunia teknologi informasi. Hasil penelitian mendeskripsikan walaupun tidak diharuskan, Kebijakan Pembangunan *e-government* disarankan untuk dituangkan kedalam beberapa tahapan rencana pembangunan (misalnya 5 tahapan), masing-masing tahapan direncanakan untuk 1 (satu) tahun masa pembangunan. Hal ini disesuaikan dengan mekanisme dan siklus pemerintahan pada umumnya, dimana program pembangunan daerah direncanakan dalam kurun waktu 20 tahunan, 5 tahunan dan setiap 1 tahun. Rencana pembangunan 5 (lima) tahunan adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah. Secara tegas disebutkan bahwa keberhasilan penerapan sistem *e-government* akan sangat bergantung kepada dukungan yang kuat baik dari sisi hukum maupun politik. Dukungan tersebut akan menjadi landasan kerja yang vital sebagai dasar untuk menggerakkan seluruh komponen yang terkait dan sekaligus mencegah adanya benturan kepentingan yang seringkali mengakibatkan kegagalan dalam pengembangan sistem. Kebutuhan tersebut didasari adanya keinginan masyarakat akan informasi yang transparan, inisiatif dari pemerintah untuk memperbaiki sistem informasi nasional yang ada, serta komitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Kemudian dalam aspek-aspek yang meliputi Kepemimpinan, Regulasi dan Sumber Daya Manusia sebagai landasan utama pengembangan utama pengembangan sistem *e government*. Setelah tersusun, barulah upaya pengelolaan dan pengendalian sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen yang akan mendasari pelaksanaan



pengembangan dan operasionalisasi *e-government* beserta lembaga pendukung teknis yang akan memberikan dukungan bagi pelaksanaannya.

Keuntungan dengan adanya pelaksanaan *e-government* dalam Pemerintah Kabupaten Sintang yang diharapkan adalah adanya perubahan-perubahan yang bermanfaat bagi proses kerja pemerintah sebagai hasil reformasi berbasis TIK yang efektif. Perubahan-perubahan ini tentunya akan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintah dengan mengurangi waktu transaksi dan menghilangkan lapisan birokrasi yang berlebihan. Beberapa contoh fungsi pemerintahan yang penyelenggaraannya dapat dibantu melalui sistem elektronik sebagaimana hasil wawancara dengan Kabag Santel dan PDE Setda adalah: Pelayanan Masyarakat, Kepegawaian, Keuangan Daerah, Pengelolaan Aset dan sebagainya. Selanjutnya mengenai Pemanfaatan *e-government* Oleh Pemerintah Kabupaten Sintang Berdasarkan Fungsi Pemerintahan meliputi fungsi sebagai berikut: pelayanan, administrasi, legislasi, pembangunan, keuangan dan kepegawaian. Selanjutnya juga diketahui bahwa, pemanfaatan *e-government* oleh Pemerintah Kabupaten Sintang berdasarkan fungsi pemerintahan dikelompokkan pada 6 (enam) aspek yaitu: (1) Bentuk Pemanfaatan *e-government* Berdasarkan Fungsi Pelayanan, (2) Bentuk Pemanfaatan *e-government* Berdasarkan Fungsi Administrasi dan Manajemen, (3) Bentuk Pemanfaatan *e-government* Berdasarkan Fungsi Legislasi, (4) Bentuk Pemanfaatan *e-government* Berdasarkan Fungsi Pembangunan, (5) Bentuk Pemanfaatan *e-government* Berdasarkan Fungsi Keuangan Daerah dan, (6) Bentuk Pemanfaatan *e-government* Berdasarkan Fungsi Kepegawaian.

## **2. Lingkungan Strategis dalam Penerapan Teknologi Informasi di Pemerintah Kabupaten Sintang**

Sebagaimana pemanfaatan *e-government* berdasarkan fungsi pemerintahan, maka pengguna *e-government* juga dapat dikelompokkan pada 6 (enam) aspek yaitu: (1) Pengguna *e-government* Berdasarkan Fungsi Pelayanan, (2) Pengguna *e-government* Berdasarkan Fungsi Administrasi dan Manajemen, (3) Pengguna *e-government* Berdasarkan Fungsi Legislasi, (4) Pengguna *e-government* Berdasarkan Fungsi Pembangunan, (5) Pengguna *e-government* Berdasarkan Fungsi Keuangan Daerah dan, (6) Pengguna *e-government* Berdasarkan Fungsi Kepegawaian.

Berdasarkan data diketahui bahwa pengguna *e-government* berdasarkan fungsi pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang terdiri atas, Instansi pemerintah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dunia usaha, masyarakat, pers, LSM/Ngo's, ormas. Pengguna *e-government*. Diketahui juga bahwa pengguna *e-government* berdasarkan fungsi Administrasi dan Manajemen adalah perangkat daerah Kabupaten Sintang. Selanjutnya, pengguna *e-government* berdasarkan fungsi legislasi adalah: DPRD, KPU, Parpol, Pers, masyarakat, LSM dan pengguna *e-government* berdasarkan Fungsi Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang adalah instansi pemerintah, dunia usaha, Masyarakat, pers, LSM/Ngo's, ormas. Pengguna *e-government* Berdasarkan Fungsi Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang adalah instansi pemerintah, DPRD, Masyarakat, pers, LSM/Ngo's, ormas. Pengguna *e-government*. Berdasarkan Fungsi Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang adalah instansi pemerintah, masyarakat (pelamar PNS).

Sistem *e-government* tidak saja menyangkut infrastruktur jaringan sebagai sarana komunikasi data dan aksesibilitas informasi tetapi juga menyangkut infrastruktur yang menyangkut struktur data dan proses sistem informasi sebagai landasan bagi aplikasi sistem informasi pemerintah. Pemasalahan jaringan infrastruktur yang dihadapi tidak semata-mata menyangkut masalah teknis fisik semata, tetapi juga mencakup masalah kepemimpinan, sumberdaya manusia, regulasi dan faktor-faktor prosedural

seperti keamanan, kewenangan pengelolaan data dan cetak biru arsitektur sistem yang belum dimiliki oleh setiap instansi maupun lembaga pemerintahan. Dengan demikian, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap proses penerapan teknologi informasi di Pemerintah Kabupaten Sintang.

## **B.1 Faktor Internal**

### **1) Sumber Daya Manusia**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia yang terdapat di jajaran Pemerintah Kabupaten Sintang masih terbilang rendah, baik dalam memasang jaringan, mengoperasikannya maupun dalam memelihara fasilitas *E-government* yang tersedia. Selanjutnya ada 2 (dua) faktor penting yang patut dipertimbangkan dalam menyusun skala prioritas pembangunan *E-government*. Kedua faktor tersebut sekaligus menjadi *pre-requisite* (kebutuhan dasar) yang harus dipenuhi untuk dapat melaksanakan program *E-government* dengan optimal. *Pre-requisite* tersebut bisa saja disiapkan bersamaan dengan pembangunan *E-government*, atau disiapkan terlebih dahulu disetiap awal tahapan pembangunan, sesuai dengan lingkup dan/atau fokus pembangunan di tahapan tersebut.

Salah satu faktor tersebut adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk dapat melaksanakan program pengembangan *E-government* dengan optimal diperlukan SDM yang menguasai kompetensi dasar bidang komputer, jaringan komputer dan internet, minimal sebagai pengguna biasa. Khusus untuk para pejabat / pengambil keputusan, maka mereka perlu juga mengetahui konsep dasar Sistem Informasi Manajemen (MIS: *Management Information System*). Jika *pre-requisite* tersebut belum dipenuhi, ada beberapa langkah yang dapat diambil, misalnya melalui pelaksanaan Program Sosialisasi *e-government*, sosialisasi/pelatihan MIS dan Sistem Pendukung Keputusan.

Keberadaan aparatur (PNS) pada Bagian Santel Dan PDE Setda Kabupaten Sintang masih belum memadai. Demikian juga para operator komputer *e-government* pada badan/dinas instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang masih belum memadai dari sisi tingkat pendidikan maupun disiplin ilmu yang diperlukan untuk mengoperasikan *e-government*.

Diketahui bahwa, lambannya pengembangan *E-government* di Sintang salah satunya disebabkan oleh kurangnya tenaga ahli komputer. Pihak BKD sendiri terus mengupayakan agar setiap unit kerja memiliki setidaknya seorang aparatur yang kompeten di bidang teknologi informasi. Akan tetapi dengan adanya Peraturan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan tentang (Moratorium) Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, maka kebutuhan akan fungsional umum pranata komputer untuk sementara waktu tidak dapat dipenuhi. Tenaga fungsional umum pranata komputer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang berjumlah 36 (tiga puluh enam) orang yang tersebar di 16 (enam belas) Satuan Kerja / Instansi Pemerintah. Masing-masing instansi memiliki jumlah tenaga ahli yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja. Memperhatikan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Sintang hingga tahun 2013 terdiri dari: 11 (sebelas) Bagian Sekretariat Daerah, 8 (delapan) Badan, 13 (tiga belas) Dinas, dan 8 (delapan) Kantor, sehingga jumlah keseluruhan Satuan Kerja adalah 40 (empat puluh) Unit Kerja. Hampir setiap unit kerja mengajukan formasi CPNS untuk jabatan Pranata Komputer tiap tahunnya. Tentunya proses usulan ini harus melalui kegiatan Analisis Jabatan (Anjab) yang dilakukan oleh unit kerja bersangkutan. Banyaknya permintaan akan tenaga ahli komputer setidaknya menunjukkan bahwa unit kerja tersebut telah menyadari pentingnya *e-government* dalam mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Hingga saat

ini Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda selaku unit kerja sektoral yang mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi terus mengupayakan agar ketersediaan Tenaga Ahli Pranata Komputer tersebut dapat terpenuhi setidaknya paling lambat sampai akhir tahun 2013.

## 2) Sarana dan Prasarana

Berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIR) Tahun Anggaran 2012 Bagian Santel dan PDE Setda dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran tersebut Bagian Santel dan PDE lebih fokus pada pengadaan peralatan penunjang komunikasi yang bersifat transmisi ke wilayah kecamatan. Kelancaran pelaksanaan pekerjaan kantor juga ditentukan oleh sarana kerja yang dimiliki. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan *e-government* memerlukan sarana kerja yang memadai dalam rangka pelaksanaan pekerjaan tersebut. Peralatan/Perlengkapan yang dimaksudkan di sini adalah semua alat dan perlengkapan yang digunakan dalam Kegiatan Perkantoran baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pengertian alat Perkantoran termasuk juga Alat Tulis Kantor (ATK) yang biasanya dimasukkan sebagai barang pakai habis, alat-alat lain yang Nonmasinal maupun Masinal, baik yang bekerja secara Manual, Elektrik, Elektromagnetik, Elektronik maupun Kimiawi. Pengelompokan macam Peralatan/Perlengkapan Perkantoran sering didasarkan pada kegiatan-kegiatan Perkantoran yang secara garis besar terdiri atas Kegiatan Pengumpulan Pencatatan, Pengolahan, Penyimpanan dan Pendistribusian atau Penyampaian Data/Informasi. Oleh karena itu, alat-alat yang dimaksudkan di sini adalah alat-alat untuk :

- a. Pengumpulan atau Perolehan Data/Informasi, seperti Telepon, Teleks, Faksimili, Radio Telepon, Komputer yang tergabung dalam Networking baik LAN maupun WAN, atau yang dilengkapi dengan Internet dan E-Mail.
- b. Pencatatan dan Perekaman, seperti mesin-mesin tulis, baik yang bekerja secara Manual, Elektrik maupun yang Elektronik seperti Komputer dengan segala kemampuannya;
- c. Pengolahan, seperti Mesin-Mesin Hitung, Mesin Akunting, Elektronik dan Processor atau Komputer yang memiliki kemampuan memproses data;
- d. Penyimpanan Data/Informasi, seperti berbagai Peralatan dalam Filing System yang Konvensional berupa Folder, Guide, Kotak File, Filing Cabinet, Almari dan Rak-Rak File atau Disk, Magnetic Tape, Film dengan segala perlengkapan penyimpanannya;
- e. Pendistribusian atau Penyampaian dengan Peralatan yang relatif sama dengan Peralatan Pengumpulan dan Perolehan Data/Informasi.

Sejalan dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada bidang-bidang lain, Teknologi pada Bidang Perkantoran pun berkembang dengan pesat. Kondisi persaingan yang semakin ketat tambahan lagi dengan sifat perkembangan yang semakin mengglobal, menuntut terwujudnya Pengambilan Keputusan yang semakin cepat dan tepat. Kecepatan dan ketepatan Pengambilan Keputusan membutuhkan Penyediaan Data/Informasi yang cepat dan tepat pula. Oleh karena itu, tuntutan terhadap Kegiatan Perkantoran tampaknya mutlak harus meningkatkan Teknologi Informasinya.

## 3) Anggaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, permasalahan mengenai anggaran untuk pengembangan *e-government* adalah terbatasnya anggaran bagi pengadaan peralatan penunjang fasilitas *e-government* disebabkan dana yang tersedia lebih difokuskan pada kegiatan-kegiatan lainnya yang memang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Sintang yaitu sektor transportasi, pendidikan dan kesehatan. Kondisi geografis Kabupaten Sintang yang relatif luas yaitu 14 (empat belas) kecamatan dengan wilayah yang terpencar-pencar dengan kondisi alam seperti gunung dan sungai cukup menyulitkan pemasangan jaringan *e-government* dalam menjangkau daerah-daerah



pedalaman (kecamatan). Peralatan penunjang (suku cadang) pengadaan fasilitas *e-government* umumnya tidak tersedia di Kabupaten Sintang. Untuk memperolehnya harus mendatangkan dari Pontianak atau Jakarta. *e-government* masih dianggap sebagai fasilitas yang mewah dan membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga hanya sebagian kecil masyarakat saja yang sudah memperolehnya. Kesenjangan yang lebar antara besarnya kebutuhan anggaran dengan keterbatasan anggaran yang dapat disediakan akan menimbulkan pengalokasian anggaran yang buruk apabila arah dan prioritas penggunaan anggaran tidak terdefinisi dengan baik, proses pengalokasian anggaran tidak sistematis, dan praktek penganggaran yang tidak transparan karena lemahnya persyaratan kelayakan pembiayaan. Untuk menghindarkan pemborosan anggaran yang merupakan uang pembayar pajak, perlu dikembangkan kerangka perencanaan dan pengalokasian anggaran secara baik. Diketahui bahwa, Anggaran Pelaksanaan *e-government* di Kabupaten Sintang setiap tahunnya semakin kecil. Permasalahan tersebut disebabkan mulai tahun anggaran 2010 terjadi penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sintang yaitu berupa dana perimbangan dari pemerintah pusat. Kebijakan pemerintah sering tidak selaras dengan DPRD sehingga pada saat pembahasan anggaran DPRD menganggap *upgrading* bagi pegawai dalam peningkatan sumber daya manusia di bidang teknologi tidak penting. Dengan demikian anggaran yang dialokasikan sering dipotong atau dihilangkan bahkan dialihkan kepada anggaran lain yang dianggap lebih penting. Namun telah terjadi pelonjakan anggaran pada tahun 2013 dan 2014.

Berkenaan dengan proses Pengadaan Barang/Jasa pemerintah secara elektronik tersebut akan lebih meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara. Selain itu, proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik ini juga dapat lebih menjamin tersedianya informasi, kesempatan usaha, serta mendorong terjadinya persaingan yang sehat dan terwujudnya keadilan (non discriminative) bagi seluruh pelaku usaha yang bergerak di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dibuat untuk mewujudkan harapan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik. Layanan yang tersedia dalam SPSE saat ini adalah *e-tendering* yaitu tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik. Syarat, ketentuan serta tata cara *e-tendering* diatur dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011.

Beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian khusus untuk menganalisis kelayakan pembiayaan rencana strategis *e-government* dari masing-masing instansi pemerintah, serta memfasilitasi dan mengintegrasikan rencana tersebut ke dalam rencana pengembangan *e-government* secara menyeluruh adalah: Arah dan sasaran penggunaan anggaran pemerintah untuk menstimulasi pencapaian tujuan strategis *e-government*. Prinsip-prinsip dan kriteria pembiayaan yang harus diterapkan agar pelaksanaan strategi pengembangan *e-government* dapat berjalan dengan baik. Kerangka alokasi anggaran pemerintah untuk pengembangan *e-government* harus disesuaikan dengan ketentuan dan persyaratan pembiayaan proyek *e-government*. Tahun Anggaran 2012 terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Santel dan PDE.

#### **4) Budaya Organisasi**

Diketahui bahwa, secara umum tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sintang adalah menyelenggarakan kewajiban pemerintah daerah yang meliputi melindungi, melayani dan mengatur rakyat. Esensi tanggung jawab pemerintah itu adalah melaksanakan “fungsi pelayanan” dan rakyat sebagai penerima manfaat pelayanan tersebut. Karena itu terwujudkan *good governance* yang dasarnya adalah terwujudnya pelayanan yang *excellent* atau yang lebih sering disebut sebagai pelayanan prima. Guna

mencapai pelayanan prima diperlukan para penyelenggara negara yang memiliki komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi pemerintah. Melalui komitmen tersebut akan muncul etos kerja setiap individu dalam organisasi dan dengan sendirinya akan terbangun budaya organisasi. Terbangunnya budaya organisasi ditentukan oleh adanya budaya individu dalam organisasi yang dapat berkembang apabila setiap PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang memiliki “komitmen” yang tinggi dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Pembentukan komitmen yang tinggi bagi setiap aparatur pemerintah salah satunya melalui proses pendidikan dan pelatihan aparatur. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000, dapat disimpulkan bahwa semua penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri sipil memiliki skenario yang sama, yaitu:

- 1) program diklat PNS dilaksanakan untuk memenuhi “kompetensi tertentu” yang dipersyaratkan bagi PNS dalam posisinya, yang meliputi *Knowledge, Skill dan Attitude*.
- 2) program diklat PNS dilaksanakan untuk membentuk “Pola Pikir” sebagai aparatur negara.

Berkaitan dengan tujuan diklat di atas diketahui bahwa, pelaksanaan diklat untuk PNS di Lingkungan Kabupaten Sintang memang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan aparatur yang memangku jabatan tertentu. Beberapa diklat rutin yang dilaksanakan BKD Kabupaten Sintang di antaranya Diklat Prajabatan Golongan II dan III, Diklatpim IV dan III, serta diklat-diklat lain yang dianggap perlu untuk dilaksanakan. Akan tetapi, diklat yang tujuannya untuk pengembangan aparatur ahli di bidang Teknologi Informasi belum dapat terlaksana hingga saat ini. Pihak BKD hanya bersifat memfasilitasi jika terdapat aparatur yang hendak mengikuti diklat bertemakan pemberdayaan teknologi informasi yang tentunya dilaksanakan oleh pihak ketiga di luar daerah. Kerangka otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Sintang sedang melaksanakan penataan otonomi kelembagaan dan ketatalaksanaan dengan tujuan untuk menyempurnakan sistem kelembagaan aparatur pemerintah daerah, manajemen pemerintahan umum dan pembangunan agar efektif dan efisien di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang meliputi kegiatan penataan kembali struktur organisasi, mekanisme kerja, dan peraturan perundang-undangan yang memadai guna menjamin efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya kesesuaian antara tugas dan fungsi, struktur organisasi dan kualifikasi maupun kuantitas pegawai, serta terbangunnya hubungan kerja antar organisasi pemerintah dan organisasi masyarakat. Masih terdapat tumpang tindih tugas dan fungsi Bagian-bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah, sehingga perlu segera dicermati untuk dilakukan penataan kembali. Terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Santel dan PDE, sering terjadi ketidaksepahaman dengan Bagian Informasi dan Komunikasi. Jika memperhatikan nama bagiannya, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan *e-government* seharusnya berada dalam wewenang Bagian Informasi dan Komunikasi. Kenyataannya Bagian Informasi dan Komunikasi hanya sebatas melaksanakan tugas protokoler, sedangkan teknisnya berada pada tupoksi Bagian Santel dan PDE Setda. Tentunya dengan Struktur dan Tata Kerja organisasi yang jelas akan sangat membantu menumbuhkan budaya organisasi yang tepat pula.

Diketahui bahwa, tidak semua pegawai di Bagian Santel dan PDE yang berasal dari latar belakang pendidikan teknologi informasi dan komunikasi. Namun bukan menjadi alasan bagi pegawai tersebut untuk tidak dapat bekerja dengan baik terutama dengan berhadapan peralatan teknologi tersebut. Tentunya diperlukan tekad untuk belajar

baik secara otodidak maupun melalui pelatihan resmi yang difasilitasi pihak Bagian Santel dan PDE. Dalam hal ini diperlukan kemampuan yang baik dalam hal penyesuaian lingkungan kerja. Pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Sintang memiliki gaya tersendiri dalam hal budaya kerja. Budaya kerja aparatur Pemerintah Kabupaten Sintang hendaknya selalu mengacu pada 5 (lima) budaya yang selalu disampaikan oleh Bupati Sintang yaitu 1) budaya kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas dan kerja keras, 2) budaya gemar membaca, 3) budaya gemar menabung, 4) budaya peduli sosial (gotong royong) dan 5) budaya pola hidup bersih dan sehat.

Dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sintang, Bupati Sintang juga menegaskan istilah ATK sebagai indikasi tercapainya visi dan misi tersebut. Istilah ini merupakan akronim dari Aman, Tenang dan Kenyang. Aman adalah suasana yang terbebas dari rasa-rasa takut dalam menjalankan kehidupan. Tenang adalah suasana batin yang tenang dan bahagia sehingga dapat mengembangkan diri secara optimal. Sedangkan makna kenyang adalah simbol kesejahteraan dan kemakmuran. Artinya, kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar manusia secara optimal. Istilah ATK ini sudah sangat familiar bagi banyak orang, juga untuk memberikan kemudahan orang mengingatnya. Harapannya, agar semua aparatur pemerintah paham dan tergerak untuk ikut andil mencapainya.

## **B.2 Faktor Eksternal**

### **1) Kondisi Ekonomi**

Kemajuan ekonomi Kabupaten Sintang ditunjukkan oleh peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun sebagaimana hasil penelusuran terhadap dokumen Kabupaten Dalam Angka (KDA) Kabupaten Sintang Tahun 2012. Pada awal tahun 2011, PDRB Kabupaten Sintang atas dasar harga berlaku mencapai 4,41 triliun rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 12,66 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2000 meningkat menjadi 2,20 triliun rupiah dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,49 persen. Laju pertumbuhan ekonomi ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,19 persen.

Pada tahun 2011, struktur perekonomian Kabupaten Sintang tidak mengalami perubahan, di mana kontribusi/peranan sektor pertanian masih menjadi dominan sebagai pimpinan (leading sector) sektor-sektor yang lainnya. Sektor pertanian memberikan sumbangan sebesar 37,80 persen terhadap keseluruhan perekonomian Kabupaten Sintang yang ditunjukkan pada PDRB harga berlaku tahun tersebut. Kemudian disusul oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 25,66 persen dan sektor jasa-jasa sebesar 9,32 persen. Diketahui bahwa, perkembangan perekonomian Kabupaten Sintang secara kuantitas juga dikarenakan meningkatnya aktivitas perdagangan menengah/besar dan eceran. Keberadaan sektor perdagangan (termasuk hotel dan restoran) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan kontribusi dalam PDRB. Selain itu, menurut Kabag Ekonomi dan Pembangunan, upaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan sekaligus mewujudkan pemerataan pendapatan, perlu dibarengi dengan peningkatan mutu sumber daya manusia yang diikuti pengendalian jumlah penduduk serta peningkatan infrastruktur. Keterpaduan antara program pemerintah dengan peran swasta dan masyarakat perlu diperhatikan guna menyelaraskan langkah dalam menggali sektor-sektor potensial yang sekaligus memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

### **2) Kondisi Politik dan Hukum**

Diketahui bahwa, ada keterkaitan antar kondisi politik dan hukum terhadap penerapan teknologi informasi. Kestabilan politik dan kebijakan pemerintah yang sesuai



dapat menciptakan suasana kondusif untuk mengembangkan aktivitas organisasi pemerintah di berbagai bidang termasuklah dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika. Pertimbangan hukum juga perlu mendapat perhatian pemerintah, antara lain adanya peraturan pemerintah mengenai pembentukan dan pengawasan organisasi yang membatasi kebijakan manajerial, termasuklah dalam pengelolaan sumber daya manusia. Dukungan politik dan hukum yang jelas sangat diperlukan dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah. Pemerintah sendiri telah mengatur hal tersebut ke dalam lingkup Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi urusan wajib bagi daerah otonom. Kesadaran hukum dan berpolitik akan menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga memudahkan implementasi kebijakan. Berdasarkan penelusuran terhadap RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015, Pemerintah Kabupaten Sintang melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik melalui misi “menerapkan asas, prinsip, standar dan pola penyelenggaraan pelayanan publik, serta menegakkan supremasi hukum dan HAM.”

### **3) Kondisi Sosial Budaya**

Keberhasilan proses pendidikan sangat tergantung oleh tersedianya sarana dan prasarana serta tenaga pengajar yang memadai, baik kualitas maupun kuantitas. Berdasarkan studi literatur terhadap KDA Kabupaten Sintang Tahun 2012, diperoleh data bahwa sampai akhir tahun 2011 jumlah prasarana SD di Kabupaten Sintang sebanyak 389 sekolah. Jumlah tersebut tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2010. Prasarana SLTP di tahun 2011 jumlahnya mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010 yaitu dari 90 sekolah menjadi 91 sekolah. Untuk jenjang pendidikan SLTA, jumlah prasarana sekolah mengalami peningkatan sebesar 5,12 persen yaitu dari 39 sekolah pada tahun 2010 menjadi 41 sekolah pada tahun 2011.

Diketahui bahwa, pendidikan formal di Sintang sudah menunjukkan perkembangan yang semakin baik tiap tahunnya. Pada tahun 2011, di Kabupaten Sintang sudah terdapat 6 (enam) Perguruan Tinggi yaitu: Universitas Kapuas, Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP), Akademi Perawat (AKPER), Sekolah Tinggi Teologi Khatulistiwa (STTK), dan Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif (STAIMA), dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Kapuas Raya. Hanya saja untuk Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komunikasi belum dapat didirikan di Sintang. Namun ke depannya akan menjadi kajian bagi pemerintah daerah mengingat teknologi informasi adalah *trend* yang mau tidak mau harus diikuti. Perhatian pemerintah daerah terhadap pendidikan khususnya di bidang teknologi informasi barulah sebatas penerapan kurikulum Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Sekolah-sekolah formal. Secara khusus, SMKN 1 Sintang telah memiliki jurusan TIK sejak beberapa tahun terakhir. Setiap tahunnya, siswa-siswa dari SMKN 1 Sintang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (magang) di Bagian Santel dan PDE Setda.

### **4) Kondisi Demografi**

Diketahui bahwa, kebijaksanaan kependudukan di Kabupaten Sintang diarahkan pada pengembangan penduduk sebagai sumber daya manusia yang dapat menunjang jalannya pembangunan daerah. Ekonomi berbasis masyarakat adalah arah kebijakan yang paling sesuai dengan karakteristik daerah yang memberikan ruh tata ekonomi usaha bersama berasas kekeluargaan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat untuk berpartisipasi sebagai pelaku ekonomi. Namun menjadi tugas tambahan bagi Pemerintah Kabupaten Sintang untuk pemberdayaan masyarakat di banyak Kecamatan dan Desa yang masih terisolir.

### **5) Perkembangan Teknologi dan Globalisasi**

Diketahui bahwa, Personal Computer (PC) multimedia yang adalah standar sistem komputer yang menyediakan fasilitas multimedia merupakan barang elektronik yang mudah dan biasa dijumpai di rumah-rumah penduduk. Bahkan yang lebih canggih

lagi adalah *laptop* dimana hampir di setiap tempat mudah sekali menemukan masyarakat yang menggunakan perangkat ini. Dikatakan multimedia karena komputer atau *laptop* tersebut dapat memiliki bermacam-macam fungsi/ media. Seperti sebagai media hiburan, media komunikasi, media pembelajaran, media promosi, dan lain sebagainya. Multimedia dapat dipahami sebagai bentuk pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafiks, audio, gambar bergerak (video dan animasi) dengan menggabungkan *link* dan *tool* yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi, berinteraksi dan berkomunikasi. Multimedia menjadi sangat akrab dengan masyarakat Sintang, bahkan tidak sedikit anak-anak berusia Sekolah Dasar sudah mahir memanfaatkan fasilitas multimedia tersebut.

Banyaknya Provider yang bersaing menyediakan layanan internet di Sintang, sehingga masyarakat Sintang memiliki banyak pilihan dalam mengakses internet. Internet sendiri merupakan jaringan elektronik yang menghubungkan jutaan komputer yang tersebar di seluruh dunia. Masyarakat Sintang sebagian besar memanfaatkan internet untuk keperluan interaksi sosial dalam dunia maya seperti *facebook* dan *tweeter*. Namun terdapat juga sekelompok orang yang memanfaatkan internet untuk keperluan bisnis, perbankan atau sekedar belanja *online*. Trend Global tentunya membuat suatu hal yang tak dapat dielak dan dipungkiri bahwa pola kehidupan manusia pada saat ini dihadapkan pada situasi yang ambigu. Menolak atau menerima perubahan jaman dengan adanya kemajuan teknologi informasi. Berdasarkan pengalaman, ditemukan tidak sedikit orang yang bersikap antipatis terhadap teknologi informasi. Bahkan terdapat juga yang berpikiran telah kehabisan waktu untuk menyesuaikan diri dengan dunia kerja yang berbasis komputerisasi, lebih baik berada di zona aman yaitu bekerja di lapangan tanpa harus bersentuhan dengan komputer. Namun ada juga yang memiliki niat untuk menguasai komputer lebih dalam, tidak hanya untuk menikmati fasilitas multimedia tetapi sekurang-kurangnya dapat mengoperasikan *Microsoft Word* dan *Excel* karena aplikasi ini yang paling sering digunakan dalam dunia kerja baik swasta maupun pemerintah.

## **B. Alternatif Strategi Dalam Menerapkan Teknologi Informasi Guna Mewujudkan E-Government Melalui SWOT**

### **1. Analisis Lingkungan Strategis**

Untuk menentukan strategi yang paling tepat bagi Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penerapan teknologi informasi perlu dilakukan analisa lingkungan yang mempertimbangkan seluruh faktor lingkungan internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan, serta faktor lingkungan eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sintang. Proses pengidentifikasian analisa lingkungan ini menggunakan metode analisa SWOT dengan berdasarkan pada fakta-fakta terkini yang ditemui di lapangan sebagai hasil wawancara, observasi dan penelusuran terhadap sejumlah dokumen yang diperlukan. Analisis SWOT ini akan mengidentifikasikan faktor internal dan eksternal. Pemerintah Kabupaten Sintang sehingga dapat diketahui potensi-potensi yang mampu dikembangkan pemerintah dimasa yang akan datang dan mengatasi kekurangan-kekurangan yang dimiliki. Dari sisi internal akan dilihat kekuatan atau kelemahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sintang itu sendiri. Sedangkan dari sisi eksternal, akan dilihat peluang dan ancaman dari luar pemerintah. Setelah mengidentifikasi faktor-faktor tersebut, dilakukan perumusan terhadap strategi dengan menggunakan diagram SWOT, sehingga dapat diketahui masalah yang dihadapi, bagaimana mencapainya serta tindakan yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan kekuatan dan merebut peluang yang ada serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi.

### 1.1. Analisis Lingkungan Internal

Analisis terhadap lingkungan internal Pemerintah Kabupaten Sintang dilakukan untuk mengidentifikasi potensi positif dan negatif dari internal organisasi pemerintah. Identifikasi ini dimaksudkan agar Pemerintah Kabupaten Sintang dapat memaksimalkan potensi dirinya dalam upaya menerapkan teknologi informasi. Identifikasi tersebut terdiri dari unsur kekuatan dan kelemahan organisasi. Adapun hasil identifikasi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

#### 1. Kekuatan (*strength*)

- Setiap unit kerja sedikitnya telah memiliki satu orang aparatur yang bertugas sebagai operator komputer *e-government* pada dinas/badan/kantornya sekalipun tidak semuanya dengan latar belakang pendidikan teknologi informasi/komputer.
- Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda selaku unit kerja sektoral yang mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi terus mengupayakan agar ketersediaan Tenaga Ahli Pranata Komputer tersebut dapat terpenuhi setidaknya paling lambat sampai akhir tahun 2013.
- Adanya jajaran pimpinan yang menuntut penggunaan teknologi informasi.
- Adanya diklat untuk PNS di Lingkungan Kabupaten Sintang yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan aparatur yang memangku jabatan tertentu serta bekerja sama dengan pihak ketiga (luar daerah) untuk diklat di bidang pengembangan teknologi informasi.
- Adanya gaya tersendiri dalam hal budaya kerja bagi aparatur guna meningkatkan kinerja pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana yang selalu disampaikan langsung oleh Kepala Daerah.
- Infrastruktur difokuskan juga pada pengadaan peralatan penunjang komunikasi yang bersifat transmiter ke seluruh wilayah kecamatan.
- Tersedianya Alat Pengumpulan Data/Informasi, seperti Telepon, Teleks, Faksimili, Radio Telepon, Komputer yang tergabung dalam Networking baik LAN maupun WAN, atau yang dilengkapi dengan Internet dan *E-Mail* hampir di seluruh unit kerja pemerintah.
- Tersedianya portal <http://www.sintang.go.id>.

#### 2. Kelemahan (*weakness*)

- Rendahnya pemahaman para pejabat / pengambil keputusan terhadap konsep dasar Sistem Informasi Manajemen.
- Kebijakan pemerintah sering tidak selaras dengan DPRD sehingga pada saat pembahasan anggaran DPRD menganggap *upgrading* bagi pegawai dalam peningkatan sumber daya manusia di bidang teknologi tidak penting. Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan sering dipotong atau dihilangkan bahkan dialihkan kepada anggaran lain yang dianggap lebih penting.
- Keberadaan aparatur (PNS) pada Bagian Santel dan PDE Setda Kabupaten Sintang maupun para operator komputer *e-government* pada badan/dinas instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang masih belum memadai dari sisi tingkat pendidikan maupun disiplin ilmu yang diperlukan untuk mengoperasikan *e-government*.
- Terdapat tumpang tindih tugas dan fungsi Bagian-bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah sehingga tidak ada kejelasan yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pelaksanaan tupoksi Bagian Santel dan PDE Setda.
- Beberapa peralatan komputer dan jaringan sering rusak atau tidak berfungsi dengan baik.



- Banyak permasalahan di luar teknologi informasi yang membutuhkan pengalokasian dana yang sangat besar sehingga mengurangi nilai prioritas terhadap teknologi informasi.
- Dibutuhkan anggaran yang cukup besar dalam pengadaan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia.
- Peralatan penunjang (suku cadang) pengadaan fasilitas *e-government* umumnya tidak tersedia di Kabupaten Sintang, sehingga perlu didatangkan dari kota lain.

### 1. 2. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis terhadap lingkungan eksternal Pemerintah Kabupaten Sintang dilakukan untuk mengidentifikasi faktor yang ada diluar organisasi yang dapat berpotensi mengganggu atau sebaliknya mempercepat upaya untuk menerapkan teknologi informasi. Identifikasi tersebut terdiri dari identifikasi atas unsur peluang dan ancaman yang sedang/kemungkinan dihadapi. Hasil identifikasi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

#### 1. Peluang (*opportunities*)

- Otonomi daerah yang memberikan kebebasan bagi daerah untuk mengelola urusannya sendiri.
- Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik.
- Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat.
- Masyarakat Sintang pada umumnya telah akrab dan familiar dengan teknologi informasi khususnya komputer dan internet.
- Banyak tenaga ahli diluar pemerintahan yang berkompeten terhadap pengembangan *e-government*.
- Bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat.
- Laju pertumbuhan ekonomi Sintang terbilang cukup tinggi dan mengalami peningkatan tiap tahunnya.
- Penerapan kurikulum Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Sekolah-sekolah formal serta semakin banyaknya Perguruan Tinggi di Sintang.

#### 2. Ancaman (*threats*)

- Tuntutan masyarakat Sintang untuk mendapatkan data dan informasi yang cepat, tepat dan terpadu, serta akurat.
- Peraturan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan tentang (Moratorium) Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, maka kebutuhan akan fungsional umum pranata komputer di Kabupaten Sintang untuk sementara waktu tidak dapat dipenuhi.
- Kondisi geografis Kabupaten Sintang yang relatif luas (14 kecamatan) dengan wilayah yang terpencar-pencar dengan kondisi alam (gunung, sungai dan lain-lain) sehingga menyulitkan pemasangan jaringan *e-government* dalam menjangkau daerah-daerah pedalaman (kecamatan).
- Belum tersedianya produk hukum daerah sebagai landasan hukum bagi pengembangan *e-government*.

### 2. Strategi Penerapan Teknologi Informasi

Setelah memetakan analisis lingkungan strategis (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menerapkan teknologi informasi, diperoleh bagaimana strategi alternatif yang dapat diambil oleh para

pengambil kebijakan di Sintang. Strategi ini ditemukan setelah melakukan analisis dengan menggunakan analisis SWOT terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi pemerintah. Terdapat 4 (empat) langkah strategi dalam penerapan teknologi informasi. Strategi tersebut digunakan untuk menghadapi empat isu-isu stratejik yang sedang dihadapi. Strategi itu adalah: 1) Strategi SO menggunakan kekuatan internal organisasi untuk memanfaatkan peluang eksternal, 2) Strategi ST menggunakan kekuatan internal organisasi untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal, 3) Strategi WO bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal, dan 4) Strategi WT bertujuan untuk mengurangi kelemahan internal dengan menghindari ancaman eksternal.

Sesuai dengan hasil kajian SWOT telah ditemukan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian (*strategic issue*) yang setidaknya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan operasional. Dalam kategori peraturan perundang-undangan, sangat memerlukan undang-undang perlindungan transaksi elektronis, dan pedoman yang jelas dalam pengembangan *e-government* di Kabupaten Sintang. Dalam kategori kebijakan, diperlukan kebijakan untuk mengalokasikan dana yang cukup untuk pengembangan *e-government* bila layanan ini dipandang sebagai salah satu kunci utama dalam menjawab kebutuhan layanan prima yang cepat, tepat, terpadu, serta akurat. Di samping itu, diperlukan juga kebijakan untuk memberi peluang, mendorong, dan menumbuhkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta kalangan perguruan tinggi dalam layanan *e-government*.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Faktor-faktor internal Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai unsur kekuatan atau kelemahan terdiri atas: 1) sumber daya manusia, 2) sarana dan prasarana, 3) dana/anggaran, dan 4) budaya organisasi. Sedangkan faktor-faktor eksternal sebagai unsur peluang atau ancaman terdiri dari 1) kondisi ekonomi, 2) politik dan hukum, 3) sosial budaya, 4) demografi dan 5) perkembangan teknologi dan globalisasi.
2. Identifikasi faktor internal menunjukkan bahwa unsur-unsur yang menjadi kekuatan bagi Pemerintah Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut: 1) Tersedianya operator komputer di unit kerja, 2) Adanya upaya ketersediaan tenaga ahli komputer, 3) Terdapat tuntutan pimpinan akan penggunaan IT, 4) Tersedianya diklat peningkatan kemampuan aparatur, 5) Terdapat budaya kerja yang baik bagi aparatur, 6) Ketersediaan peralatan penunjang komunikasi tersebar ke seluruh kecamatan, 7) Ketersediaan alat pengumpulan data/informasi, dan 8) Tersedianya portal website pemerintah daerah. Sedangkan yang menjadi unsur kelemahan bagi penerapan teknologi informasi diantaranya: 1) Rendahnya pemahaman pejabat terhadap konsep SIM, 2) Tidak selarasnya kebijakan birokrasi dan legislatif, 3) Tidak memadainya disiplin ilmu aparatur, 4) Tidak ada kejelasan tupoksi bagian di Setda, 5) Peralatan yang rusak/tidak berfungsi, 6) Banyak permasalahan luar yang membutuhkan prioritas anggaran, 7) Dibutuhkan anggaran yang cukup besar dalam pengadaan infrastruktur, dan 8) Suku cadang fasilitas *e-government* umumnya tidak tersedia di Sintang.
3. Identifikasi faktor eksternal menunjukkan unsur-unsur yang menjadi peluang bagi Pemerintah Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut: 1) Kewenangan yang luas dalam Otonomi Daerah, 2) Hadirnya PP No.54/2010 tentang *e-procurement*, 3) Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat, 4) Masyarakat telah akrab dengan komputer dan internet, 5) Tersedianya tenaga ahli swasta di bidang IT, 6) Adanya dukungan dan bantuan pemerintah pusat, 7) Laju pertumbuhan ekonomi

Sintang yang cukup tinggi, dan 8) Penerapan kurikulum TIK serta semakin banyaknya Perguruan Tinggi di Sintang. Sedangkan yang menjadi unsur ancaman bagi penerapan teknologi informasi diantaranya: 1) Adanya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan data dan informasi yang cepat, tepat dan terpadu, serta akurat, 2) Terjadinya Moratorium Penundaan Sementara Penerimaan CPNS, 3) Kondisi geografis Sintang yang menyulitkan instalasi peralatan *e-government*, dan 4) Belum tersedianya produk hukum daerah sebagai landasan hukum bagi pengembangan *e-government*.

4. Strategi penerapan teknologi informasi di Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai bentuk penjabaran lebih rinci dan rangkum terhadap strategi-strategi hasil pemetaan faktor internal dan eksternal (diagram SWOT) tersebut meliputi: 1) Pengembangan organisasi dan tata kerja, 2) Pembuatan aturan perundangan dan kebijakan, 3) Pengembangan SDM untuk menerapkan teknologi informasi, 4) Pembangunan infrastruktur dan akses jaringan komunikasi data yang memadai, 5) Pengembangan perangkat-perangkat lunak yang diperlukan, 6) Pemeliharaan dan perawatan perangkat lunak dan keras/jaringan, dan 7) Pengembangan dan koordinasi layanan informasi yang mampu mendukung terwujudnya masyarakat yang kompetitif serta menarik investasi ke Sintang sehingga semakin meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat Sintang.

#### **B. Saran**

Strategi-strategi yang telah dirumuskan tersebut adalah upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penerapan teknologi informasi, sehingga kualitas pelayanan publik semakin meningkat. Dampak yang diharapkan dengan adanya pengembangan *e-government* tersebut adalah pelayanan publik dengan menggunakan media teknologi informasi semakin memberikan kontribusi yang positif. Strategi penerapan teknologi informasi ini disusun dengan memakai pendekatan perencanaan strategis melalui analisis SWOT. Dengan demikian, rencana ini bersifat luwes dan dinamis, dalam arti setiap saat dapat diperbaharui bila terdapat perubahan kondisi yang signifikan, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal yang menuntut perubahan strategi dan program. Dengan memakai pendekatan perencanaan strategis maka partisipasi *stakeholders* (dalam hal ini termasuk pula: masyarakat dunia usaha dan perguruan tinggi) sangat diperlukan untuk menajamkan strategi pengembangan teknologi informasi ini.

#### **DAFTAR REFERENSI**

##### **Buku**

- Arikunto, S. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta
- Azmi, Yan. 2009. *Pengertian informasi*. <http://yanazmi.blogspot.com/2009/04/pengertian-informasi.html>
- Basri, Faisal H. 2005. *Tantangan dan Peluang Otonomi Daerah*. Universitas Brawijaya, Malang. <http://128.8.56.108/irisdata/PEG/Bahasa/malang/Malang/tantangan.pdf>, 21 Januari 2013).
- Bryant dan White. 1987. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, Cetakan Pertama, Alih Bahasa Rusyanto L. Simatupang. Jakarta: LP3ES.
- Bryson, John M. 1988. *Strategic Planning for Public And Non Profit : A Guide to Strengthening And Sustaining Organizational Achievement*. San Fransisco, CA : Jossey-Bass, Inc.



- ....., 1995. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*, Terjemahan Miftahuddin. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Chandler, Michael. 2003. *Dreamweaving Rahasia Menaklukkan Pesaing dalam Bisnis*. Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer.
- D., Riant nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Formulasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Hadari Nawawi. 1991. *Administrasi Personnel untuk Meningkatkan Produktivitas Kerja*, Jakarta : PT. Gramedia.
- Hani Handoko, 1995. *Manajemen Personalia dan Manajemen SDM*. Yogyakarta : BPFE - Yogyakarta.
- Ishak. 2008. *Pengelolaan Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi*. Pustaka: Jurnal Studi Perpustakaan dan Informasi, Vol. 4, No. 2 pp 87.
- Jogiyanto.2003.*Teori Portofolio Dan Analisis Investasi* . Edisi Ketiga. Yogyakarta : BPFE.
- Moleong, Lexy.J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. 2000. *Manajemen Strategik Ilustrasi di bidang pendidikan*. Yogyakarta : Gajah Mada Press.
- Nazir. 1999. *Metode Penelitian* . Jakarta : Ghalia M
- Rangkuti, Freddy. 2006. *Analisa SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rangkuti, Freddy. 1997. *Riset Pemasaran*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Salusu J, 1998. *Pengambilan Keputusan startegik untuk Organisasi Public dan Organisasi Non Profit*. Jakarta : PT Grasindo.
- Seesar, Yolivia Astrianiez. 2010. *Perbandingan Implementasi Insourcing, Cosourcing, dan Outsourcing dalam Pengembangan Sistem Informasi*. Bogor : Magister Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor.
- Siagian, S P. 2003. *Manajemen Stratejik*, Cetakan Ke-5. Jakarta : Bumi Aksara.
- Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelititan Survei*. Jakarta : LP3S.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Supratikno Hendrawan , dkk, 2005. *Advanced Strategic Management, Back to Basic Approach*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Sutarman. 2009. *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Suyanto, M. 2005. *Strategi Perancangan Iklan Televisi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Thai Fung Jin. 2002. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Akuntan Publik*. Tesis S-2 UGM. 2002.
- Thompson, Arthur A. and Strickland, A. J., Gamble. 2005. *Strategic Management : concepts and cases*, McGraw-Hill, New York.
- Tripomo, Tedjo, 2005. *Manajemen Strategi*. Jakarta: Rekayasa Sains.
- Wahyudi, Bambang. 1996. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Sulita.

#### **Dokumen Pemerintah:**

- Intruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.
- Kabupaten Dalam Angka (KDA) Kabupaten Sintang Tahun 2013.
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sintang Tahun 2012.
- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sintang Tahun 2012.
- Laporan Keuangan Kabupaten Sintang Tahun 2013.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.

Peraturan Bupati Sintang Nomor 89 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2011-2005.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

